

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

-----*Undang-Undang Tentang Kekejarantinaan Kesehatan. UU Nomor 6 Tahun 2018.*

-----*Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan. UU Nomor 30 Tahun 2014.*

-----*Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU Nomor 13 Tahun 2006.*

-----*Undang-Undang Tentang Kesehatan. UU Nomor 6 Tahun 2018.*

-----*Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU Nomor 12 Tahun 2011.*

-----*Undang-Undang Tentang Kementerian Negara. UU Nomor 39 Tahun 2008.*

-----*Peraturan Presiden tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). PERPRES Nomor 82 Tahun 2020.*

-----*Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Keppres Nomor 7 Tahun 2020.*

-----*Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*

-----*Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Nomor PM 82 Tahun 2013.*

- , *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Nomor 122 Tahun 2019.*
- , *Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).*
- , *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.*
- , *Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*
- , *Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).*
- , *Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).*
- , *Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor SE 46 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 38 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).*
- , *Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 47 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 37 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi Covid-19.*
- , *Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor SE 43 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dari Luar Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*

- , *Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*
- , *Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi Darat Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).*
- , *Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*
- , *Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 36 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).*
- , *Surat Edaran Nomor SE 56 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona Virus Diseuase 2019 (COVID-19).*

B. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Hamzah, Andi. (2015). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Edisi digabungkan dalam satu buku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ishaq. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismatullah, Deddy. A, Asep. (2007). *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Katharina, Amryudiin. (2020). *Birokrasi dan Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19*, Jurnal Vol XII No.9. Jakarta: InfoSingkat.
- Mansur, Arief, dkk. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Qamar, Nurul. (2010). *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*. Makassar: Pustaka Refleksi.

Raharjo, Satijipto. (1982). *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.

Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

C. Lain-lain

A, Susilo. Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Volume 7 No 1, 2020.

Ansori, Lutfi. Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Yuridis*. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/282102-diskresi-dan-pertanggungjawaban-pemerint-5670c687.pdf>. diakses 7 Juni 2022.

Asshiddiqie, Jimly. Diakses dari https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf,h.1., diakses tanggal 26 Mei 2022.

Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, diakses dari <https://baketrans.dephub.go.id/berita/upaya-transportasi-cegah-penyebaran-covid-19>, diakses tanggal 22 Juni 2022.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Diakses dari <https://bkad.kalbarprov.go.id/urgent/29>, diakses tanggal 22 Juni 2022.

Banjarnabor, P. Konsep Penegakan Hukum. Diakses dari <http://eprints.umm.ac.id/51456/58/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 7 Juni 2022.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Kemenhub Terbitkan Aturan Pengendalian Transportasi Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19. Diakses dari <http://dephub.go.id/post/read/kemenhub-terbitkan-aturan-pengendalian-transportasi-menuju-masyarakat-produktif-dan-aman-Covid-19?language=id>, diakses tanggal 28 April 2022.

Bisnisnews. Kontra Produktif, Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 Harus Segera Dicabut dan Revisi, Diakses dari <https://bisnisnews.id/detail/berita/kontra-produktif-permenhub-nomor-18-tahun-2020-harus-segera-dicabut-dan-revisi>, diakses tanggal 28 April 2022.

- Detik.com. Pernyataan Lengkap Jokowi Tetapkan Status Darurat Kesehatan Corona, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4959881/pernyataan-lengkap-jokowi-tetapkan-status-darurat-kesehatan-karena-corona>, diakses tanggal 17 November 2021.
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Penguatan Sistem Kesehatan Dalam Pengendalian Covid-19, diakses dari <http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalam-pengendalian-covid-19/>, diakses tanggal 22 Juni 2022.
- Disantara, Fradhana Putra. Legitimasi Surat Edaran dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Diakses dari <https://rechtsidee.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee/article/view/645/702?Download=pdf>, diakses tanggal 28 April 2022.
- Fatmaningdyah, Yusti, M Fatchoelqorib. Kebijakan Perjalanan Udara Di Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19). Diakses tanggal 21 Juni 2022.
- Hadi, Abdul. Selebgram Erlanggs alias Rangga Ditangkap Karena Palsukan Surat Swab ,Diakses dari <https://www.antvklik.com/hiburan/selebgram-erlanggs-alias-rangga-ditangkap-polisi-karena-palsukan-surat-swab>, diakses tanggal 30 Juni 2022.
- Hakim, Amrie. Perbedaan antara Peraturan Menteri dengan Keputusan Menteri. Diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-antara-peraturan-menteri-dengan-keputusan-menterilt4f1a24ebf2_c43, diakses tanggal 28 April 2022.
- Haliem, M Azsmar. Diskresi Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/diskresi-pemerintah-di-tengah-pandemi-Covid-19-lt5e9546f8c326a>, diakses tanggal 13 Mei 2022.
- Halim, Devina. Kapolri Perintahkan Jajarannya Proses Hukum Siapapun yang Langgar Protokol Kesehatan, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/16/21151481/ini-ancaman-pidana-bagi-pelanggar-protokol-kesehatan-Covid-19?page=all>, diakses tanggal 21 April 2022.
- Harirah, Zulfa. Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid-19 di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, Volume 7 No.1 2020, hlm 38.

- Idris, Muhammad. PPKM Adalah Singkatan Dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, diakses tanggal 13 Februari 2022.
- Ilmi, Novinka Quddratul. Negara Hukum. Makalah, h.5-6. Diakses tanggal 26 Mei 2022.
- Indrayanto, Wisnu. Dampak Pandemi Covid-19 dan Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/777/pdf>, diakses pada tanggal 27 April 2022.
- Iqbal, Muhammad. Implementasi Kebijakan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Covid-19 di Bandar Udara Sultan Bantilan Tolitoli, diakses dari www.journal.formosapublisher.org, diakses tanggal 1 Agustus 2022.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, diakses dari <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundangundangan/inmendagri/28784>, diakses tanggal 26 Juni 2022.
- Jaya, Indra. Penguatan Sistem Kesehatan Dalam Pengendalian Covid-19, diakses dari <http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalam-pengendalian-Covid-19/>, diakses tanggal 18 April 2022.
- Kartika, Holy. 3 Vaksin Covid-19 di Indonesia, Perbedaan Vaksin Sinovac, AstraZeneca dan Sinopharm, diakses dari <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/03/190200023/3-vaksin-covid-19-di-indonesia-perbedaan-vaksin-sinovac-astrazeneca-dan?page=all>, diakses tanggal 22 Juni 2022.
- Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, Artikel Hukum Administrasi Negara Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Terhadap Peradilan Tata Usaha Negara, diakses dari https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2942:undang-undang-administrasi-pemerintahan-terhadap-peradilan-tata-usaha-negara&catid=103&Itemid=184, diakses tanggal 7 Juni 2022.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diakses dari <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>, diakses tanggal 22 Juni 2022.